

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan di bidang pendidikan yang dialami bangsa Indonesia pada saat ini adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pembentukan watak kepribadian siswa, hal itu mengakibatkan kemerosotan kualitas kepribadian serta kesadaran sebagai warga negara yang baik.

Bangsa Indonesia sekarang berada di era reformasi yang ditandai dengan keinginan bersama untuk membentuk negara Indonesia yang demokratis. Kehidupan demokrasi yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan bentuk pemerintah dan masyarakat yang demokratis.

Sikap demokratis sangat diperlukan dalam pemerintahan Indonesia yang demokratis. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung, pemerintahan atau sistem politik demokratis (Winarno, 2007:97)

Negara yang demokratis akan dapat berdiri kokoh apabila warganegaranya memiliki budaya demokrasi, yang tercermin dalam perilaku

dalam berbagai aspek kehidupan. Di masa reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia menghadapi masa yang penuh gejolak, diantaranya semangat keterbukaan demokrasi, penegakan hak asasi manusia persaingan global dan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Fenomena ini perlu dicermati semua pihak khususnya para guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal tersebut mendorong tekad untuk berupaya membentuk sikap warga negara yang baik, salah satunya dengan pembelajaran sikap demokratis di sekolah.

Dalam pembelajaran sikap demokratis para pendidik berperan besar terhadap kegagalan pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah, walaupun tidak semua pendidik telah gagal menjalankan tugas sebagai pendidik, tapi kenyataan menunjukkan masih kurangnya kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam pembelajaran sikap demokratis adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Pembelajaran sikap demokratis tidak hanya pada aspek kognitifnya saja tapi idealnya harus pada tahap penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai yang diajarkan.

Upaya penanaman sikap demokratis melalui pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan haruslah melakukan reorientasi dan berusaha menerapkan paradigma baru pendidikan nasional, yang tujuan akhirnya adalah

pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis dan berpegang pada nilai *civility* (keadaban) (Rosyada, dkk, 2003:xiii).

Dalam kaitannya dengan pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, guru memiliki peranan yang strategis dan penting, yaitu membentuk sikap siswa dalam berperilaku keseharian, sehingga diharapkan setiap individu mampu menjadi pribadi yang baik. Tugas guru bukan sekedar *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*. Nilai-nilai yang ditanamkan guru kepada para siswa bertujuan untuk memberi pencerahan jiwa dalam berbagai aspek seperti memupuk jiwa demokrasi dan kemanusiaan, mengembangkan sikap jujur, adil dan lain-lain.

Nilai demokrasi sebagai pola hidup menurut John Dewey (1966:87) dalam bukunya *Democracy and Education* dinyatakan bahwa:

Demokrasi bukan sekedar bentuk suatu pemerintahan, tapi lebih sebagai pola hidup bersama (*associated living*) dan hubungan dari pengalaman berkomunikasi. Kian banyak orang terlibat dalam kepentingan-kepentingan orang lain yang berbeda, mereka akan kian banyak merujuk segala perbuatannya kepada kepentingan orang banyak, kian majemuk masyarakat akan semakin demokratis.

Masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sangat diperlukan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui sekolah (Azra, 2002:157). Menciptakan kultur demokrasi bukan saja tidak mudah, melainkan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.

Kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis karena belum adanya kesadaran dan mentalitas (Taniredja, dkk, 2009:55).

Munculnya berbagai fenomena merosotnya komitmen masyarakat terhadap etika berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku kekerasan, pemaksaan kehendak dan menurunnya penghormatan terhadap pemerintah menjadi keprihatinan kita semua. Dikalangan remaja dan pelajar, merosotnya nilai-nilai demokrasi terlihat dari beberapa kejadian dan perilaku yang sering dijumpai di media massa. Fenomena seperti itu dapat dilihat dengan adanya perkelahian antar pelajar, demokrasi yang anarkhis dan sikap otoriter dari para pemimpin.

Model pembelajaran sikap demokratis adalah keterlibatan siswa untuk mengambil keputusan diperlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Model transaksi sosial yang horizontal merupakan salah satu bentuk pendidikan ini yang menghasilkan keterbukaan, transparansi, dan pengambilan keputusan bersama. Oleh karena itu pendidikan yang demokratis merupakan model pendidikan yang fungsional. Kita berteriak demokrasi, akan tetapi diri kita sendiri mungkin tidak pernah mengalami hidup secara demokratis. Akhirnya kita juga tidak dapat menerapkan hidup secara demokratis (DJohar, 2003:11).

Kegagalan dalam penanaman sikap demokratis disebabkan materi pelajaran khususnya pendidikan kewarganegaraan yang masih bersifat idealis dan normatif. Penyebab lainnya yaitu guru dalam proses belajar mengajar di kelas bersifat indoktrinatif dan kurang melibatkan partisipasi siswa. Hal ini disebabkan materi yang lebih teoritis daripada praktis, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teori yang diajarkan dikelas dengan realitas yang terjadi di luar kelas.

Kondisi diatas menuntut semua anggota masyarakat untuk mengantisipasinya demi kepentingan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan penerapan nilai-nilai demokrasi diharapkan cita-cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan.

Untuk menghadapi tantangan terjadinya krisis nilai demokrasi sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk berani melakukan terobosan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut untuk membentuk pribadi warga negara yang sempurna. Dalam pembelajaran sikap demokrasi di sekolah tidak dapat dilaksanakan melalui satu mata pelajaran saja, tetapi harus tercakup dan terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran khususnya ilmu-ilmu sosial, yang dikatakan sebagai pendekatan integratif.

Perlu difikirkan agar tidak timbul kekhawatiran bahwa anak didik memperoleh hasil belajar yang sangat bagus namun kemampuan tersebut jauh dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sangat ironis apabila siswa mendapat nilai bagus tapi hanya sekedar pengetahuan dan hafalan-hafalan yang tidak ada pengalaman dalam kehidupan nyata di masyarakat. Tidak mustahil bila anak muda meski sangat pandai dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka tidak berbudi luhur dan berbuat hal-hal yang merugikan banyak orang lain (Suparno, dkk, 2002:11).

Masalah pokok proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai demokratis masih mengalami berbagai kendala sehingga kualitas lulusan yang diharapkan memiliki nilai-nilai luhur masih belum memuaskan. Hal ini terjadi karena masih minimnya pemahaman guru

dan pihak sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam setiap mata pelajaran, hambatan-hambatan guru dan kepala sekolah dalam upaya pembinaan nilai-nilai tersebut dan penerapan sanksi terhadap siswa yang melanggar belum optimal.

Dengan pengelolaan pembelajaran yang baik diharapkan akan mampu membentuk peserta didik yang menguasai aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Para pendidik dan pengelola sekolah sekarang ini mengetahui bahwa cukup lama sekolah formal hanya menekankan dalam perkembangan pengetahuan (kognitif) melalui konsep "*learning to know*".

Materi yang diberikan belum dapat menumbuhkan rasa afeksi, umumnya disampaikan dalam bentuk verbalisme, yang juga disertai dengan *rote-memorizing*. Akibatnya bisa diduga, matapelajaran agama cenderung hanya sekedar untuk diketahui dan dihafalkan agar lulus ujian; tetapi tidak untuk diinternalisasikan dan dipraktikkan, sehingga betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri setiap peserta didik (Azra, 2002: 181).

Peran media massa, televisi, internet, video dan media lain juga sangat berpengaruh dalam perilaku siswa. Siswa dihadapkan pada tontonan yang menayangkan serta mengenalkan nilai-nilai yang sangat bertolak belakang dengan nilai demokrasi di kelas. Misalkan di sekolah diajarkan tentang kesadaran berdemokrasi, bagaimana menghormati hak orang lain, musyawarah mufakat, tetapi media massa justru mengekspos hal yang sebaliknya seperti tindakan kekerasan, main hakim sendiri, unjuk rasa yang brutal, wakil rakyat yang saling memukul di dalam sidang dan lain-lain.

Masalah di atas apabila tidak segera di atasi akan semakin mengancam kehidupan generasi mendatang khususnya dan merusak kehidupan sosial

masyarakat pada umumnya. Nilai demokrasi sebagai salah satu inti setiap kebudayaan merupakan sarana pengatur dari kehidupan bersama perlu terus ditanamkan pada kepribadian siswa agar jangan sampai melemah.

Masalah penanaman nilai sebenarnya telah dimulai dan dilakukan dari dalam lingkaran keluarga melalui peran orang tua dalam menerapkan pola demokrasi melalui kebiasaan yang terjadi proses transformasi nilai baik disadari atau tidak. Sekolah dan institusi pendidikan berperan membantu keluarga dalam usaha penanaman nilai-nilai sebagai wahana yang paling strategis.

Sekolah sebagai lembaga strategis karena sekolah merupakan tempat pendidikan formal dengan struktur yang berjenjang dan ditangani secara profesional. Disekolah masalah pembelajaran nilai dapat dilaksanakan secara lebih terarah, sistematis, terpadu. Selain itu guru dalam pembelajaran akan menjadi sosok teladan bagi para siswa dalam penerapan demokrasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kegiatan di luar kelas.

Thomas Lickona (1991) menyatakan sekolah harus menjadi tempat dimana siswa dapat belajar menjadi “pintar dan baik”. Masyarakat yang bijak sejak jaman Plato telah menjadikan pendidikan moral sebagai tujuan sekolah. Lickona percaya bahwa karena anak- hidup dalam demokrasi, mereka harus memahami dan sepakat terhadap cita-cita moral demokrasi antara lain menghormati hak-hak individu dan kelompok, menghormati hukum, dan kemauan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Nash, 1997:19).

Untuk mengembangkan demokrasi perlulah masyarakat belajar hidup berdemokrasi proses belajar berdemokrasi akan lebih lancar dan terarah bila dimulai sejak masa taman kanak-kanak selama di sekolah (Suparno, 2002:25). Lebih lanjut dikatakan bahwa pendidikan demokrasi di sekolah hanya akan berjalan dengan baik dan lancar bila guru atau pendidik yang mengajarkan demokrasi, hidup dan bersikap demokratis dalam tugas mereka.

Dengan demikian penanaman sikap demokrasi perlu dilaksanakan baik di sekolah maupun diluar sekolah yang membutuhkan kemampuan dan partisipasi keluarga, sekolah dan masyarakat. Di sekolah pembelajaran sikap demokrasi dapat diaktualisasikan melalui organisasi-organisasi yang ada di sekolah, sebagai wahana mengembangkan budaya demokrasi yang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku siswa sehari-hari.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai demokrasi siswa yang manakah yang dikembangkan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura?
2. Bagaimana strategi pembelajaran sikap demokratis di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran sikap demokratis di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengelolaan pembelajaran sikap demokratis di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi siswa yang dikembangkan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.
2. Untuk mengetahui strategi pembelajaran sikap demokratis di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembelajaran sikap demokratis di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah diperolehnya diskripsi nyata di lapangan tentang pengelolaan pembelajaran sikap demokratis di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dan diharapkan dapat memberi manfaat praktis:

1. Dapat memberi pengetahuan dalam praktek pembelajaran sikap demokratis siswa.
2. Sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran sikap demokrasi di SMP.

3. Memberi sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan aktifitas siswa dalam bersikap bertingkah laku baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
4. Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti yang dapat menjadi sumber dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran sikap demokratis.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sekolah.

2. Pembelajaran

Pembelajaran adalah upaya orang yang bertujuan untuk membantu orang belajar, titik beratnya pada semua kejadian yang bisa berpengaruh secara langsung pada setiap orang dan disampaikan dengan bantuan media cetak, gambar, komputer dan media lain.

3. Sikap demokratis

Sikap demokratis yaitu suatu bentuk evaluasi perasaan kecenderungan potensial untuk bereaksi sebagai hasil interaksi antara komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling bereaksi didalam

memahami, merasakan dan berperilaku untuk merespon penyelenggaraan negara maupun pemerintahan berlandaskan kesadaran sebagai warganegara yang bertanggung jawab.